

**TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP
REKLAMASI TELUK JAKARTA**

(Studi Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017)

SKRIPSI

Oleh :

Firda Cahyani

NIM C75214004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM TATA
NEGARA**

S U R A B A Y A

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Firda Cahyani
NIM : C75214004
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Siyāṣah Dustūrīyah* Terhadap Reklamasi
Teluk Jakarta (Studi Analisis terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Agustus 2018

Saya yang menyatakan

 Firda Cahyani
The stamp is a green rectangular revenue stamp from Indonesia. It features the Garuda Pancasila emblem at the top right. The text 'METERAI TEMPEL' is at the top, followed by 'TGL. 20' and the serial number '1BD17AEF769872441'. The value '6000' is prominently displayed in the center, with 'ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom.

NIM. C75214004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Firda Cahyani NIM: C75214004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 Juli 2018

Pembimbing



Drs. Jeje Abdul Rozaq, M.Ag
NIP : 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firda Cahyani, NIM: C75214004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Drs. Jeje Abdul Rozaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji II

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III

M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya 6 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firda Cahyani
NIM : C75214004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : firdacahyani340@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP REKLAMASI TELUK JAKARTA

(Studi Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Firda Cahyani)

nama terang dan tanda tangan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iError! Bookmark r
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	1
KATA PENGANTAR.....	li
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II <i>SIYĀSAH DUSTURĪYAH</i>	
A. Pengerttian <i>Siyāсах Dustūrīyah</i>	19
B. Sumber Hukum <i>Siyāсах Dustūrīyah</i>	22
1. Al-Qur'an.....	22
2. Al-Hadist.....	22
3. Ijma'.....	23
4.Qiyas	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orde reformasi memunculkan berbagai macam pandangan dan pemikiran yang sebelumnya tidak pernah muncul di permukaan. Dalam kehidupan suatu bangsa mempunyai pandangan hidup yang mencerminkan cita-cita dari kehidupan bangsa itu sendiri. Pandangan hidup itu dapat berupa kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan yang luhur dari bangsa. Pandangan hidup ini kemudian menjadi dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Negara adalah suatu organisasi tertinggi satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu serta mempunyai pemerintahan yang berdaulat.² Di dalam suatu negara terdapat organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Indonesia memang dikenal sebagai Negara kepulauan Nusantara, artinya Negara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, baik pulau besar seperti pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan Papua maupun pulau-pulau kecil lainnya. Indonesia sebagai Negara kepulauan, memiliki struktur pulau-pulau yang tersebar luas dalam jumlah lebih dari 13.000

¹ Yuswalina, SH, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Malang: PT. Setara Press, 2016), 29.

² Meksasai Indra, SH, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 1.

pulau besar dan pulau kecil, dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km memberikan ciri khas pada lingkungan laut alaminya.³

Menurut Supriharyono, diperkirakan 60% dari penduduk Indonesia hidup dan tinggal di daerah pesisir. Sekitar 9261 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa atau pemukiman pesisir. Mereka ini kebanyakan merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang relatif sangat rendah.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat membutuhkan lahan-lahan baru dalam kegiatan sosial ekonominya yang nantinya akan menjadi profesi untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya, sedangkan yang terjadi saat ini lahan yang ada di daratan semakin terbatas, sehingga dengan keadaan seperti ini menyebabkan pemerintah mulai memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan dan mencari profesi dengan memanfaatkan kekayaan alam untuk keberlangsungan hidup, sehingga muncul permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan lahan bagi aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.⁵

³ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), 6.

⁴ Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 4.

⁵Wahyudi Kumorotomo, *Reformasi aparatur Negara ditinjau kembali*, (Yogyakarta:Gava Media, 2010), 356.

Salah satu proyek reklamasi yang sedang berjalan di Indonesia yaitu proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau G di teluk Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2014 kepada perusahaan pengembang PT. Muara Wisesa Samudra, dipandang sebagai sebuah langkah dimana perusahaan membangun fasilitas agar mendapatkan izin konstruksi dari Pemprov DKI Jakarta.⁷

Persoalan yang mewarnai urusan pemberian izin dan pelaksanaan pengawasan di bidang-bidang usaha masyarakat, perlu pemantapan dan

⁷Serian Wijatno, MH, “ Mengkaji Dampak Reklamasi di Pantai Utara Jakarta”,
<http://infobanknews.com/mengkaji-dampak-reklamasi-di-pantai-utara-jakarta/>, “diakses pada”
 28, juli, 2018.

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menegaskan bahwa:

*“Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.*¹³

Selain itu, masyarakat nelayan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan Gubernur DKI Jakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”¹⁴

Dalam pandangan islam, negara boleh saja memberikan tanah rawa atau semacamnya kepada individu atau kelompok individu atau korporasi. Hanya saja dalam memberikan itu semua, negara tetap harus memperhatikan banyak ketentuan syariat lainnya. Selain itu juga harus

¹³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017, hlm 54

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

- Maka dari itu dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 terkait reklamasi teluk Jakarta kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 ditinjau dari *Siyāsah Dustūriyah*.

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang:

- [illegible]

- b. Tinjauan *Siyasah Dustūrīyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pikiran terkait bahan pertimbangan pemerintah tentang reklamasi teluk Jakarta.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan maksud dari judul diatas sebagai berikut:

1. *Siyāṣah Dustūrīyah* yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta. Selain itu *Siyāṣah Dustūrīyah* membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.²²
2. Putusan Mahkamah Agung adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 92K/TUN/LH/2017 adalah tentang reklamasi teluk Jakarta.

²² Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 48.

imamah, hak dan kewajiban rakyat beserta statusnya, dan lembaga peradilan dalam memutuskan suatu perkara.

Bab ketiga, memuat pembahasan tentang pemberian izin reklamasi pulau G di teluk Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta di surat keputusannya Nomor 2238 Tahun 2014 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017.

Bab keempat, berisi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta dan analisis Putusan Mahkamah Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta ditinjau dari *Siyāṣah Dustūrīyah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.

Di dalam kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah Fiqh *Dustūri* yang dimaksud dengan *Dustūri* adalah:

“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya”.⁴⁹

صك ينطوى على القواعد الاساسية التى يقوم عليها نظام دولة

Dari dua takrif tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata *Dustur* sama dengan Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia. Sehingga bila dipahami bahwa *Siyāṣah Dustūrīyah* merupakan kajian terpenting di dalam suatu Negara, karena membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas. Dan di dalam *Dustur* itu tercantum

⁴⁹ Muhammad Syafiq Ghorbal, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassaroh*, Darul Qalam al-Qahiroh, 1965. 794.

Persoalan *Siyāsah Dustūriyah* tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

1. Al-Qur'an

⁵⁰Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah ...*,4

العادة محكمة

“Suatu adat dapat dijadikan hukum”

C. Objek Kajian *Siyāṣah Dustūrīyah*

⁵³Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 131.

Apabila dilihat dari sisi lain, *Siyāṣah Dustūrīyah* ini dapat dibagi menjadi.⁵⁵

1. Bidang *Siyāsah tasrī'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyāsah tanfidīyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al ahdi*, dll.
3. Bidang *Siyāsah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah peradilan.
4. Bidang *Siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah administratif dan kepegawaian.

⁵⁵ Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat*,... 48.

[illegible]

Definisi imam yang dikemukakan oleh Al –Iji sebagai berikut :

Adapun definisi kata-kata *imamah* ditakrifkan oleh Al-

Mawardi dengan:

الاعامة موضوع خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”.⁵⁹

Dari pengertian diatas, terdapat catatan penting. *Pertama*, para ulama ahli sunnah menyamakan pengertian imamah dan khalifah. *Kedua*, definisi di atas tampak jelas bahwa para ulama mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama ketimbang persoalan duniawi.

Sebagai seorang imam atau pemimpin haruslah melaksanakan kewajiban yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya, karena hak seorang pemimpin akan datang apabila kewajibannya telah dilaksanakan dengan baik. Adapun kewajiban-kewajiban imam menurut Al-Marwadi adalah:⁶⁰

⁵⁸Qamarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung: Pustaka, 1983) 50.

⁵⁹Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*,...5.

⁶⁰Ibid, 15.

- Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman kepada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti pada masa khalifah yang ke empat, teladan Nabi memang masih diterapkan dalam mengatur masyarakat islam yang sudah berkembang. Dalam masa ini, pola peralihan kepemimpinan umat sudah baik, karena didasarkan pada kecakapan dan kemampuan, tidak berdasarkan keturunan.⁶¹

⁶¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 159.

2. Persoalan Rakyat dan Hak-Haknya

Kebebasan seseorang melakukan hak-haknya dibatasi oleh keharusannya menghormati hak-hak orang lain. Karenanya di dalam sebuah masyarakat selalu ada aturan atau norma-norma masyarakat,

⁶³ Osman Raliby, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), 136.

dan merupakan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat melaksanakan aturan-aturan tersebut.⁶⁴

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Suyuti Pulungan juga menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia meliputi:⁶⁶

1. Hak untuk hidup.
2. Hak atas milik pribadi dan mencari nafkah.
3. Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi.
4. Hak berpendapat dan berserikat.
5. Hak kebebasan beragama, toleransi atas agama, dan hubungan antar pemeluk agama.
6. Hak persamaan di depan hukum dan membela diri.
7. Hak kebebasan dari penganiayaan.
8. Prinsip amar makruf nahi munkar.

⁶⁴Idrus Affandi, *Hak Asaai Manusia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 31.

⁶⁵ Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 64.

⁶⁶Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* ...,16.

Tauhid dan ukhuwah islamiah merupakan dasarnya Negara Islam. Dalam masyarakat berkeadilan sosial, hak asasi manusia akan terjamin. Namun, dalam mencapai keadilan sosial itu diperlukan adanya pembebasan jiwa manusia dari segala macam rasa takut serta rakyat haruslah diperlakukan dengan adil. Semua rakyat akan mengeyam nikmatnya keadilan jika tidak ada perbedaan di depan keadilan karena turunan bangsa dan darah, karena harta dan pangkat, dan lain sebagainya.

Di dalam sebuah Negara tentunya memiliki sebuah konsep yang bersifat umum dan dapat dihubungkan dengan berbagai macam persoalan yang ada. Indonesia merupakan Negara hukum yang berarti Negara tersebut dapat menegakkan supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. Dalam Negara hukum, penguasa tidak boleh berbuat menurut kehendak dan

[illegible]

Stahl merumuskan empat unsur-unsur pokok Negara hukum, yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, Negara didasarkan pada trias politica, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang dan adanya peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani suatu masalah. Oleh karena itu gagasan Stahl ini lebih menekankan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang.⁶⁹

Abdul Kadir Audah membagi kekuasaan dalam negara Islam ke dalam lima bidang yaitu:⁷¹

1. *Sultah Tanfiziyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. *Sultah Tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. *Sultah Qadhaiyah* (kekuasaan kehakiman).

⁷¹ Ibid, 237.

30

5. *Sultah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Mengenai kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, melindungi orang yang kehilangan, dan lain sebagainya.

Kata hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah fiqh, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan. Hakim juga merupakan pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Namun, yang menjadi pembuat hukum hakiki dari hukum syariat adalah Allah.⁷² Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An’am: 57:

إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”.⁷³

Adapun mengenai adanya pelimpahan kekuasaan yudikatif kepada majelis *qadha'* memberi kemungkinan bahwa adanya lembaga yang membela hukum tidak saja untuk menyelesaikan masalah dari serangan warga yang menyimpang, tetapi juga penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pejabat. Dalam hal pertama, meskipun ia adalah seorang pejabat, ia dapat dituntut karena melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan yang kedua, majelis *qadha'*

⁷²Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*,...41.

⁷³ Al-Qur'an, Surah Al-An'am, Ayat 57.

Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan dilakukan oleh lembaga yudikatif (*Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*). Dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini meliputi wilayah al hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *Al-Qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya baik perdata maupun pidana) dan wilayah *Al-Mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya. Seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia.⁷⁵

⁷⁴ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah (Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an)*,...306.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*,...137.

⁷⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*,...137.

Untuk terselenggaranya peradilan, yang harus ada dalam *A/-Mazhalim* yaitu:⁷⁸

- Kelengkapan-kelengkapan tersebut harus ada, karena bertujuan agar proses sidang berjalan dengan lancar. Mengingat keberadaan lembaga *Madzhalim* merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran islam.

[illegible]

✓BAB III

A. Sejarah Reklamasi Teluk Jakarta

Indonesia yang umumnya dipahami sebagai Negara demokrasi tidak lepas dari kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan salah satu hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan itu berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Selain itu, kebijakan pemerintah merupakan pengelolaan kekuasaan Negara.⁷⁹

Dalam konteks kehidupan saat ini, di kota-kota besar seperti di daerah Jakarta memiliki jumlah penduduk yang sangat pesat. Sehingga lahan yang tersedia tidak mendukung laju pertumbuhan serta perkembangan wilayah tersebut, khususnya di wilayah pesisir pantai. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan dengan cara mereklamasi pantai. Salah satu proyek reklamasi yang sedang berjalan di Indonesia adalah proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

Di daerah Jakarta, terdapat 17 pulau yang digunakan sebagai kawasan reklamasi. Salah satunya adalah reklamasi pulau G di teluk Jakarta. Pada tanggal 23 Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan izin pelaksanaan proyek

⁷⁹ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Parsitipasi)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 97.

⁸⁰Evi Mariani, “Kronologi Reklamasi 17 Pulau di Jakarta, [http:// medium.com/evimariani/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-Jakarta](http://medium.com/evimariani/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta) “diakses pada” 12, Mei, 2016.

[illegible]

B. Motif Pemberian Izin Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Berbicara mengenai perizinan, tentunya tidak lepas dari kebijakan pemerintah, seperti hal nya kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang memberikan izin reklamasi teluk Jakarta kepada perusahaan pengembang di dalam Surat Keputusan Nomor 2238 Tahun 2014.

⁸⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2010) 193.

Gubernur DKI Jakarta menerbitkan izin reklamasi atas kemauan perusahaan pengembang. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Atas pemberian izin pelaksanaan reklamasi itu, PT. Muara Wisesa Samudra diharuskan untuk menyediakan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan pantura, antara lain ruang terbuka hijau, sempadan pantai, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat. Selain itu, dalam pelaksanaan proyek reklamasi di pulau G teluk Jakarta, PT. Muara Wisesa Samudra diharuskan memberikan kontribusi berupa pengerukan sedimentasi sungai di daratan, dan kontribusi lahan seluas lima persen dari luas lahan areal reklamasi yang tidak termasuk peruntukan fasum untuk diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kontribusi lainnya untuk revitalisasi kawasan pantai utara Jakarta berupa pembangunan rumah susun bagi rakyat kalangan menengah ke atas, penataan kawasan, peningkatan

**C. Substansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017
tentang Reklamasi Teluk Jakarta**

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017, pihak-pihak yang berperkara antara lain:

I. 1). Nur Saepudin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rt 05, Rw 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Nelayan.

II. Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA),
diwakili oleh Abdul Halim, kewarganegaraan Indonesia, selaku
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan
Perikanan (KIARA)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- [illegible]

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara Publik dari “Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta”, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta, 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing- masing untuk Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi III tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk Pemohon Kasasi II tanggal 1 November 2016

b. Identitas Tergugat

I. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Selatan, Blok 8-9, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Solafide Shite S.H., M.H
2. Momon Mulyana, S.H., M.SI
3. Taufiq Marhendra, S.H., M.SI
4. Haratua D.P Purba, S.H
5. Muchlis, S.H

Kesemuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, beralamat pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok
G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Pusat.

II. PT. Muara Wisesa Samudra, diwakili oleh: Noer Indradjaja, SH dan
H. Renaldi Freyar Hawadi, kewarganegaraan Indonesia selaku
Direktur PT. Muara Wisesa Samudra.

Objek sengketa dalam masalah ini adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Thun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra.

3. Deskripsi Kasus

Berawal dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2238 Tahun 2014 yang mana memberikan izin reklamasi kepada perusahaan pengembang. Dari Surat Keputusan tersebut, memberikan pandangan negatif terhadap masyarakat khususnya yang berada di pulau G Teluk Jakarta, yang berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat merasa khawatir akan terjadinya dampak negatif pada ekosistem air laut dan akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat yang mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan. Karena, teluk Jakarta adalah suatu ekosistem yang penting bagi masyarakat di pesisir dan menjadi pendukung yang tidak terpisahkan dari sistem tata air atau hidrologi lingkungan DKI Jakarta. Selain itu, reklamasi memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, perkumpulan koalisi rakyat untuk keadilan perikanan dan yayasan wahana lingkungan hidup merasa tidak terima atas kebijakan tersebut. Para nelayan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya pemberian izin reklamasi. Sedangkan perkumpulan koalisi rakyat untuk keadilan perikanan dan yayasan wahana

Akhirnya kelompok masyarakat nelayan, perkumpulan koalisi rakyat untuk keadilan perikanan dan yayasan wahana lingkungan hidup, mengambil sebuah langkah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana pengadilan tersebut merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.⁸⁵

⁸⁵Arif Wijaya, *Hukum Tata Usaha Negara*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 145.

Bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta, maka dalam gugatan tersebut, Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra dan Majelis Hakim memerintahkan agar Gubernur

Dengan adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Gubernur DKI Jakarta mengambil langkah untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena tidak setuju dengan salah satu poin keputusan hakim yang menunda reklamasi pulau G yang dianggap tidak memiliki dasar hukum.⁸⁷ Aturan untuk melakukan reklamasi sudah diatur di dalam peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor 228/B/2016/PT.TUN.JKT, Majelis hakim mengabulkan banding yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta karena gugatan yang diajukan oleh kumpulan para nelayan ke PTUN kadaluwarsa. Para Penggugat yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melalui Kuasa Hukumnya telah mengetahui obyek sengketa

⁸⁷ Raynaldo Ghiffari , “Ini Alasan Pemprov DKI Ngotot Ajukan Banding Soal Reklamasi Pulau G”, *Merdeka*, (2, Juni, 2016)

Akhirnya Majelis hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan tenggang waktu di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 diatur lebih lanjut oleh SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Tahun 2015. Tenggang waktu sembilan puluh hari sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.⁸⁹

Setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memenangkan Gubernur DKI Jakarta,

⁸⁹ Danu Damarjati, “Alasan PT.TUN Menangkan Ahok: Gugatan Pihak Nelayan Kadaluwarsa”, *Detik News*, (21, Oktober, 2016) .

4. Pertimbangan Hukum Hakim

- diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 21 November 2016. Oleh karena itu masyarakat n dipandang tidak menyerahkan memori kasasi.
2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta benar, karena koalisi rakyat untuk keadilan perikanan dan w

a. Pencabutan kuasa oleh kumpulan para nelayan yang dilakukan tidak mempengaruhi status yang bersangkutan sebagai pemohon kasasi karena pencabutan surat kuasa tidak berlaku surut. Masyarakat nelayan sendiri tidak pernah menyatakan mencabut kasasi dan tidak memberitahukan pencabutan kuasa kepada perkumpulan koalisi rakyat untuk keadilan perikanan dan yayasan wahana lingkungan hidup (pencabutan sepihak).

b. Pembeneran terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berakibat gagalnya fungsi pelaksanaan judicial control terhadap tindakan pemerintah dan penegakan hukum administrasi oleh Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pilar utama negara hukum yang dianut dan wajib dipertahankan oleh organ dan komponen Negara Republik Indonesia.

Karena terjadi perbedaan pendapat dalam majelis hakim dan setelah dilakukan masyawarah dan diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak mencapai jalan mufakat, maka majelis hakim memutuskan bahwa kasasi dari para nelayan tidak dapat diterima dan menolak permohonan kasasi dari koalisi rakyat untuk keadilan perikanan, dan yayasan wahana lingkungan hidup.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung tersebut
maka dengan demikian proyek perencanaan proyek reklamasi tetap

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017, majelis hakim tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh para nelayan dan menolak gugatan kasasi dari koalisi rakyat untuk keadilan perikanan dan yayasan wahana lingkungan. Karena nelayan telah mencabut surat kuasanya untuk melanjutkan kasasi dan tidak pula menyatakan melanjutkan proses kasasi secara sendiri. Sehingga dianggap tidak menyerahkan memori kasasi dan dinilai tidak memenuhi ketentuan formal. Sementara gugatan dari koalisi rakyat

nelayan tidak pernah memberitahukan pencabutan kuasanya, kuasanya hukumnya sehingga relevan untuk dipertimbangkan dari musyawarah harus dilaksanakan dengan ikhlas, kebenaran dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi golongan. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat memengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka oleh hakim diantaranya pengaruh atau intervensi yang bersumber dari kekuasaan politik yang selama ini memang sulit untuk diuraikan sebagai kenyataan.⁹¹ Pengaruh sering kali sangat dominan dalam mempengaruhi pemegang kekuasaan kehakiman, sehingga tindakannya tidak merdeka sebagaimana harapan dan idealnya sebuah

nelayan tidak pernah memberitahukan pencabutan kuasanya, kuasanya hukumnya sehingga relevan untuk dipertimbangkan dari musyawarah harus dilaksanakan dengan ikhlas, kebenaran dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi golongan. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat memengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka oleh hakim diantaranya pengaruh atau intervensi yang bersumber dari kekuasaan politik yang selama ini memang sulit untuk diuraikan sebagai kenyataan.⁹¹ Pengaruh sering kali sangat dominan dalam mempengaruhi pemegang kekuasaan kehakiman, sehingga tindakannya tidak merdeka sebagaimana harapan dan idealnya sebuah

Usaha Negara sebagai pilar utama Negara Hukum yang dianut dan wajib dipertahankan oleh organ dan komponen Negara Republik Indonesia. Adanya reklamasi menyebabkan terjadinya dampak ekologis terhadap lingkungan hidup diantaranya adalah terjadi peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir, serta penggenangan di wilayah pesisir. Selain itu merugikan nelayan tradisional di teluk Jakarta. Kerugiannya mulai dari tidak bisa menangkap ikan di perairan yang telah diberikan, hilangnya sumber daya ikan yang berada di perairan tersebut, kerusakan sumber daya perairan yang terjadi akibat konstruksi reklamasi yang sebelumnya telah berjalan, tidak bisa melintasi wilayah tersebut lagi dan kesemuanya akan berdampak kepada masalah-masalah ekonomi dan sosial.

Kebijakan Gubernur ini bukan hanya terbatas pada persoalan penerbitan izin yang merugikan masyarakat, akan tetapi lebih mementingkan kepentingan pengusaha dan mengesampingkan kepentingan publik, serta telah menyalahgunakan kewenangan administrasi pemerintahan. Karena persoalan tentang reklamasi perlu dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pada akhirnya, kelemahan atas dikeluarkannya izin reklamasi tidak mencerminkan atau memperlihatkan tentang dampak kajian lingkungan hidup dan potensi kerugian terhadap kehidupan ekonomi

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut bahwa Al-Qur'an yang membenarkan kebenaran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadili perkara yang terjadi antar sesama manusia dengan berdasarkan hukum-hukum yang diajarkan Allah. Berdasarkan kitab itu, Nabi Muhammad memutuskan suatu perkara dengan adil. Beliau dilarang menjadi lawan bagi yang benar atau kawan bagi yang salah.

[illegible]

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam mengeluarkan keputusan nomor 2238 tahun 2014 yang memberikan izin mereklamasi pulau G di teluk Jakarta kepada perusahaan peternakan jika ditinjau berdasarkan *Siyāsah Dustūrīyah* belum sesuai dengan kewajiban dari seorang *imamah* (pemimpin). Karena setelah surat keputusan Gubernur terbit, masyarakat nelayan tidak dapat beraktivitas dengan adanya surat keputusan Gubernur yang membe-

Jika dalam sebuah pemerintahan terdapat suatu masa pemimpin dengan rakyat maka musyawarah adalah jalan menyelesaikannya. Karena musyawarah merupakan salah

keimanan seseorang untuk menyelesaikan perkara dengan cara mufakat.

Dalam konteks ajaran islam, seorang pemimpin diwajibkan bermusyawarah dalam urusan negara, baik itu politik, ekonomi, sosial maupun perundang-undangan dalam segala hal yang menyentuh kepentingan pribadi dan umum. Suatu masalah yang ada nash, haruslah diselesaikan sesuai dengan ketentuan nash atau hukum.

Kebijakan Gubernur dalam menerbitkan izin reklamasi tidak mengedepankan keadilan dan belum sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan untuk umat. Karena apabila reklamasi itu dilaksanakan akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan perekonomian rakyat. Padahal sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila pemimpinnya dapat berlaku adil dalam menjalankan pemerintahan atau melakukan tugas-tugas pemerintahan. Keadilan harus menjadi pegangan dalam segala hal dan waktu. Keadilan di dalam kehidupan manusia berhubungan dengan keadilan sosial serta perikemanusiaan yang meliputi segala bidang kehidupan. Keadilan sosial dapat berwujud dalam berbagai perundang-undangan yang menyentuh masalah-masalah pribadi masyarakat. Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai kelompok golongan. Seorang yang terpilih menjadi pemimpin harus mampu berdiri di atas semua golongan.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Manusia mempunyai kecenderungan alami untuk memimpin karena mereka diciptakan sebagai khalifah. Menjadi seorang *imamah* atau pemimpin, harus didasari dengan sifat yang penuh kemuliaan dan keluhuran budi pekertinya supaya menjadi contoh bagi rakyatnya dan harus menegakkan keadilan dimanapun ia berada.

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya yakni :

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozaq Jeje. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Affandi Idrus. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Universitas Terbuka. 2009.
- Al-Qur'an. Surah Al-An'am Ayat 57.
- Al-Qur'an. Surah An-Nisa' Ayat 105.
- Arifin Zainal. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Prespektif Konstitusi. Jakarta: Prenada Media Group : 2012
- Ash-Siddieqi Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Yogyakarta: Al-ma'arif.
- Ash Shofa Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta,1996.
- Belarminus Robertus .PTUN Menangkan Gugatan Nelayan soal Reklamasi Pulau G. Kompas.31 Mei 2016.
- Damarjati Danu . Alasan PT.TUN Menangkan Ahok: Gugatan Pihak Nelayan Kadaluwarsa. Detik News. 21 Oktober 2016.
- Djazuli, Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Djumialdji. Hukum Bangunan (Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia). Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1996.
- Ghiffari Raynaldo. Ini Alasan Pemprov DKI Ngotot Ajukan Banding Soal Reklamasi Pulau G. Merdeka.2 Juni 2016.
- Hadjon Philipus .Tata Perizinan pada Era Otonomi Daerah.Jakarta : Rajawali Pers. 2015.
- Hamdi Muchlis. Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Parsitipasi).Bogor: Ghalia Indonesia. 2015.
- Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Hasimi A. Di Mana Letaknya Negara Islam.Surabaya : Bina Ilmu. 1984.

- Ibrahim Jindan. Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Iqbal Muhammad. Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam). Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Indra Mexsasai. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung:PT. Refika Aditama. 2011.
- Khan Qamarudin. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Bandung: Pustaka. 1983.
- Kumorotomo Wahyudi. Reformasi aparatur Negara ditinjau kembali. Yogyakarta: Gava Media. 2010.
- Mariani Evi. Kronologi Reklamasi 17 Pulau di Jakarta <http://medium.com/evimariani/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-Jakarta> .12 Mei 2016.
- Muin Salim Abdul. Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an). Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Mulyanto. Reklamasi Lahan Rendah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Mustaqim Ibnu. Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara). (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).
- Pulungan Suyuthi. Fiqh Siyasah. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 1997.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 228/B/2016/PT.TUN. JKT
- Raliby Osman. Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara.Jakarta: Bulan Bintang. 1962.
- Rifqi M. Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perspektif Siyasah, (Skripsi--Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Rimdan. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Kencana. 2012

- Sarudji Didik. Wawasan Lingkungan. CV. Media Ilmu. 2006.
- Saturi Sapariah. Kasus Pulau G: Mahkamah Agung Tolak Kasasi Warga. <http://www.google.co.id/amp/www.mongabay.co.id/2017/08/15/kasus-pulau-g-mahkamah-agung-tolak-kasasi-warga-langkah-lanjutan/amp/>. diakses pada 15 Agustus 2017.
- Setiawati Tri. Pandangan Islam tentang reklamasi. www.panjimas.com/citizens/2017/12/21/pandangan-islam-tentang-reklamasi/, diakses pada 21 Desember 2017.
- Silalahi Daud. Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional. Jakarta: Sinar Harapan. 1992.
- Spelt. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika. 1993.
- Supriharyono. Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Supriyadi Dedi. Perbandingan Fiqh Siyasah Konsep Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Sutedi Andrian. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syafieq Ghorbal Muhammad. *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyasaroh*. Darul Qalam al-Qahiroh. 1965.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Wijatno Serian. Mengkaji Dampak Reklamasi di Pantai Utara Jakarta. <http://infobanknews.com/mengkaji-dampak-reklamasi-di-pantai-utara-jakarta/>.diakses pada 28 juli 2018
- Wijaya Arif. Hukum Tata Usaha Negara. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Yuswalina. Hukum Tata Negara di Indonesia. Malang: PT.Setara Press. 2016
- Zada Khamami. Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam). Erlangga. 2008.

